

**KOMUNIKASI PEMERINTAH DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DESA SUATU STUDI DI DESA SOATOBARU KECAMATAN GALELA BARAT  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**WELDI R. DILAGO  
ALDEN LALOMAH  
NOVVA N. PLANGITEN**

**Abstrak**

*The communication of the Soatobaru village government in the implementation of development was important among all parties involved in the village development effort, especially between the village government and the community. Dissemination of development information that has been carried out until now is carried out through communication media from communicators to communicants, both those handled by the village government and the media. In the concept of communication, a communicator here plays a very important role, why? Because a Communicator must have good communication skills so that a communicant can capture messages quickly and accurately. In implementing village development for village-scale local authority, the village government needs to carry out development stages which include; Planning, Budgeting, Implementation, Reporting, Monitoring and Monitoring. Reliable indicators are knowledgeable communicators. The purpose of village development, as stated in Law No. 6 of 2014 concerning Villages, is to improve human welfare and reduce poverty through the provision of basic needs, development of village facilities and infrastructure, development of local economic potential and sustainable use of natural and environmental resources.*

**Keywords:** *Communication, Village Government, Planning, Development*

**PENDAHULUAN**

Kegiatan pembangunan nasional merupakan suatu usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan adanya kualitas-kualitas manusia melalui program-program pembangunan. Pembangunan Indonesia pada dasarnya adalah upaya pemenuhan keadilan bagi rakyat Indonesia. Pembangunan dilaksanakan berdasar rencana besar bangsa Indonesia melalui perencanaan nasional, provinsi, kabupaten dan desa.

Dalam melakukan perencanaan pembangunan dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) secara legal menjamin aspirasi masyarakat dalam pembangunan dalam kesatuannya dengan kepentingan politis (keputusan pembangunan yang ditetapkan oleh legislatif) maupun kepentingan teknokratis (perencanaan pembangunan yang dirumuskan oleh birokrasi). Aspirasi dan kepentingan masyarakat ini dirumuskan melalui proses perencanaan partisipatif yang secara legal menjamin kedaulatan rakyat dalam berbagai program/proyek pembangunan desa. Perencanaan partisipatif yang terpadukan dengan perencanaan teknokratis dan politis menjadi wujud nyata kerjasama pembangunan antara masyarakat dan pemerintah (Robinson 2010).

Pemerintah pada saat ini telah melakukan perbaikan-perbaikan pembangunan diberbagai sektor pembangunan, sebagai usaha dalam pencapaian tujuan negara. Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan pada hakekatnya merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang selaras dengan pembangunan nasional yang menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang merata khususnya di desa diperlukan peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan, karena pembangunan tidak semata-mata menjadi tugas pemerintah saja tetapi melainkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab dari masyarakat bahkan keberhasilan pembangunan tergantung partisipasi masyarakat baik secara fisik maupun moril.

Pada dasarnya pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalui dengan jalan perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, perubahan tersebut dilakukan melalui pembangunan. Tujuan pembangunan masyarakat ialah perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat mengalami perubahan. Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintah, melalui otonomi dan desentralisasi yang diharapkan mampu melahirkan partisipasi aktif masyarakat dan menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah. Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri. Masyarakat sebagai objek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini perlu ikut masyarakat dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya.

Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian ragam dan kadar partisipasi seringkali ditentukan secara massa yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi.

Adanya kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang pada masyarakat. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam seluruh proses kebijakan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan. Salah satu kunci demi terciptanya kelancaran pembangunan di pedesaan adalah peranan komunikasi pemerintahan (dalam hal ini kepala desa) untuk dapat menyampaikan berbagai informasi tentang kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa kepada masyarakat setempat agar masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan tersebut. Penyebaran informasi pembangunan yang sudah dilakukan sampai sekarang dilakukan melalui media komunikasi dari komunikator ke komunikan, baik yang ditangani pemerintah desa maupun dengan media tradisional yang berlaku pada sistem sosial masyarakat. Selain itu juga melalui masyarakat resmi. Namun demikian penyebaran informasi ke masyarakat pedesaan dengan melalui media modern tidak selamanya dapat lebih efektif. (Effendy, 2013)

Di dalam menyalurkan pesan-pesan perencanaan pembangunan, kepala desa dan aparatur desa bertindak sebagai penyaring atau jembatan dalam pelaksanaan komunikasi. Artinya, pertama-tama kepala desa berkewajiban menyaring dan menyerap pesan-pesan dan informasi pembangunan dari pemerintah. Pesan-pesan tersebut kemudian disesuaikan dengan keadaan masyarakat desanya. Setelah itu barulah kepala desa (komunikator) menyampaikan informasi dan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakatnya. Jadi dalam masyarakat desa, kepala desa mempunyai kedudukan penting sebagai penyalur pesan dan informasi pemerintah, dan menjadi penyalur terbawah pesan-pesan dan informasi perencanaan pembangunan.

Pembangunan di Desa Soatobaru bisa dikatakan belum terlalu baik karena masih ada sebagian program-program yang di jalankan belum terealisasi dengan optimal, seperti contoh pada pembuatan Jalan Tani 7 Km, instalasi air bersih, dan pelebaran badan jalan pemukiman masyarakat (jalan sirtu). Melihat hal tersebut, merasa perlu untuk mendorong keterlibatan masyarakat atau warga dari berbagai level, baik dimulai dari level forum warga yang ada di Desa Soatobaru dan juga komponen

masyarakat warga yang lain, seperti tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian untuk turut serta melibatkan diri dalam proses perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan.

Setelah melakukan observasi awal penulis menemukan berbagai permasalahan, yakni masih kurangnya pemerintah desa dalam hal ini kepala desa bahkan aparatur desa untuk berkomunikasi dengan masyarakat, kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang program pembangunan, serta jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan masih sedikit.

Berdasarkan Penelitian ini penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu menurut Cynthia M. Bonde (2012) dengan judul Peran Komunikasi Pemerintah dalam Pembangunan Balai Desa Makaruo Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa terhambatnya peran komunikasi pemerintah dalam pembangunan balai desa adalah ketidakaktifan antara kepala desa dan sekertaris desa untuk melaksanakan pembangunan balai desa tersebut. Hal ini dikarenakan tidak terjadi kerjasama bahkan kurangnya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, sehingga kedua pihak tidak dapat mengontrol proses pelaksanaan pembangunan balai desa tersebut. Pengertian komunikasi pembangunan adalah segala upaya, cara dan teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak pemerintah yang memprakarsai pembangunan kepada masyarakat yang menjadi sasaran, agar dapat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan. Dari hasil penelitian mengenai pembangunan balai desa yang sementara dilaksanakan, maka pemerintah desa Makaruo mengharapkan kepada masyarakat setempat agar masyarakat ikut berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan balai desa tersebut.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Komunikasi**

Menelusuri kata komunikasi, berasal dari bahasa latin yaitu *communicatio* bersumber dari perkataan *comunis* yang berarti “sama”. Secara etimologis mendefinisikan. “komunikasi” adalah suatu proses yang membuat suasana berbeda dalam kebersamaan kepada dua orang atau lebih yang tadinya memonopoli satu orang saja. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai pengoperasian ide dan gagasan untuk menyatukan kekuatan sehingga terjadi interaksi antara orang-orang yang berkomunikasi, untuk menuju pencapaian tujuan bersama (kesamaan makna). Kata lain yang mirip dengan komunikasi adalah “komunitas” (community) yang juga menekankan kesamaan atau kebersamaan. Komunitas adalah sekelompok orang yang berkumpul atau hidup bersama untuk mencapai tujuan tertentu, dan mereka berbagi makna dan sikap. Tanpa komunikasi tidak ada komunitas, karena komunikasi berperan dan menjelaskan kebersamaan.

Sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan komunikasi akan timbul jika seorang manusia mengadakan interaksi dengan manusia lain, jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi timbul sebagai akibat dari adanya hubungan social. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.

Kata komunikasi atau *communication* dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin *communis* yang artinya “sama”, *communico*, *communication*, atau *communicare* yang berarti “membuat sama” (*to make common*). Istilah pertama (*communication*) adalah istilah yang paling sering sebagai asal usul kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. (Mulyana, 2013:4)

Komunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dalam konsep komunikasi, seorang komunikator disini berperan sangat penting, mengapa

? Karena seorang Komunikator itu harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik supaya seorang komunikan dapat menangkap pesan secara cepat dan tepat. Selain itu, seorang komunikator yang handal adalah komunikator yang mempunyai banyak pengetahuan. Dalam hal ini, adalah pengetahuan tentang pesan yang ia sampaikan. Disini, bukan berarti seorang komunikator adalah orang yang harus tau segalanya, tapi mengerti dan faham tentang apa-apa yang sudah ia sampaikan kepada komunikan. Sebuah pesan pun harus dijelaskan secara tepat dan akurat agar tercapai tujuan penerimaan pesan yang disampaikan oleh komunikator.

Tujuan penerimaan pesan adalah supaya para komunikan mampu menerima pesan dan memberikan feedback yang baik kepada komunikator. Media yang dipakai sebagai sarana menyampaikan pesan pun harus disesuaikan. Karena itu, seorang komunikator yang handal harus dapat memahami karakteristik media komunikasi. Sehingga, pada akhirnya dapat memilih media apa yang tepat dan sesuai dengan karakter pesan maupun karakter khalayaknya.

Untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif, kita dituntut untuk tidak hanya memahami prosesnya, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan kita secara kreatif. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi bersifat dua arah yaitu dimana makna yang distimuluskan sama atau serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator atau pengirim pesan.

### **Konsep Pemerintah Desa**

Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Pemerintahan desa tersebut merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam System pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan pemerintahan suatu desa, dibutuhkan pemerintah desa yang menjadi motor pelaksana dari tugas-tugas yang harus dijalankan dalam pemerintahan desa tersebut. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala desa akan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari: sekretaris desa; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis. Perangkat desa tersebut diangkat langsung oleh kepala desa dari warga desa setelah dikonsultasikan kepada camat atas nama bupati/walikota. Perangkat desa tersebut akan bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selama masa jabatan kepala desa dan akan bertanggungjawab langsung kepada kepala desa.

Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat di bedakan dalam fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Instruktif

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintah itu agar keputusan dapat di laksanakan secara efektif.

2. Fungsi Konsultatif

Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut di gunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan masyarakat-masyarakat yang di pimpinnya.

3. Fungsi Partisipasi

Dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semuanya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

4. Fungsi Delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan.

#### 5. Fungsi Pengendalian

Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam. Koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarah, koordinasi dan pengawasan.

### **Konsep Masyarakat**

Manusia merupakan bagian dari kehidupan makhluk sosial yang ada di muka bumi, kumpulan dari manusia inilah yang kemudian dikenal sebagai masyarakat. Pengertian masyarakat sendiri secara umum diartikan sebagai sebuah kesatuan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang berda dalam sebuah wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Adanya bermacam-macam wujud kesatuan kolektif manusia menyebabkan bahwa kita memerlukan beberapa istilah untuk membedakan berbagai macam kesatuan manusia tadi. Kecuali istilah paling lazim yaitu masyarakat, ada istilah khusus untuk menyebut kesatuan-kesatuan khusus yang merupakan unsur-unsur dari masyarakat, yaitu kategori sosial, golongan sosial, komunitas, kelompok, dan perkumpulan. Keenam istilah sebutan itu beserta konsepnya, syarat-syarat pengikatnya, serta ciri-ciri lainnya.

Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society*, yang berasal dari kata Latin *socius*, yang berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti ikut serta berpartisipasi. Berbicara masyarakat tidak terlepas dari beberapa sekelompok individu sehingga membentuk masyarakat itu sendiri, maka kita dapat simpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan atau sekelompok orang yang hidup di suatu tempat atau wilayah dan berinteraksi dengan lingkungannya. Suatu masyarakat majemuk itu merupakan masyarakat yang terdiri dari satuan-satuan sosial yang secara relatif berdiri sendiri (Koentjaraningrat, 2012:143).

Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama, yang bisa menjadi alasan terbentuknya lapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkatan umur, sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat, dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu. Alasan-alasan yang dipakai berlainan bagi tiap-tiap masyarakat.

Kondisi umum yang menyebabkan munculnya masyarakat sendiri salah satunya disebabkan adanya naluri alami manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya hubungan dengan manusia yang lain. Dengan demikian, manusia akan memiliki reflek bawah sadarnya untuk selalu berusaha mencari manusia lainnya dalam upaya menyempurnakan kodratnya sebagai makhluk hidup yang mempunyai akal dan pikiran. Manusia tidak akan mampu memiliki kehidupan yang lengkap, jika manusia tidak mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan atau berada di sebuah kawasan dimana tidak terdapat manusia lain.

### **Konsep Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja (2013) menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan

pemikiran mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

### **Konsep Pembangunan**

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.

Dalam melaksanakan pembangunan desa untuk kewenangan lokal berskala desa, maka pemerintah desa perlu melakukan tahapan pembangunan yang meliputi; Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Pengawasan. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi secara mandiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan yaitu 1. Orang Kepala Desa, 1. Orang Perangkat Desa, 2. Orang Tokoh Masyarakat 1. Masyarakat Desa, 1. Orang BPD. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu wawancara, observasi/dokumentasi. Dan teknik analisa data menggunakan, kategori data, reduksi data, interpretasi data, penarikan kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana telah disebut dalam uraian /diteliti adalah untuk menjelaskan Komunikasi Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa yaitu didefinisikan sebagai keberhasilan pemerintah dalam membangun desa dalam mencapai tujuan dan saran pemerintah desa yang telah ditetapkan yaitu Komunikasi Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa diamati dari dua kriteria yaitu preventif, represif.

Keberhasilan sebuah pembangunan sangat ditentukan oleh perencanaan yang berkualitas. Selanjutnya, untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas dibutuhkan komunikasi dari berbagai pihak. Kalau pembangunan yang dilaksanakan ditingkat desa, maka yang bertanggungjawab dalam hal perencanaan dengan komunikasi adalah kepala desa. Seorang komunikator atau kepala desa selaku pimpinan tertinggi di desa harus bisa dan benar-benar dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Untuk itu, kepala desa harus mampu dan bisa merealisasikan tujuan pembangunan dengan senantiasa selalu berkomunikasi dengan instansi desa yang berkait dan mensosialisasikan pada masyarakat yang ada di Desa Soatobaru melalui musyawarah. Selain itu, kepala desa harus senantiasa berkomunikasi dengan pihak kecamatan untuk melaksanakan perencanaan komunikasi pembangunan dan nantinya perencanaan tersebut dapat diselenggarakan melalui musyawarah (Musrenbangdes).

Dalam perencanaan pembangunan, kepala desa menghubungi langsung sekretaris desa untuk segera membuat surat undangan. Selanjutnya, menghubungi RT, untuk membagikan undangan mengikuti musyawarah. Selain itu, kepala desa memfasilitasi perencanaan yakni menyediakan tempat untuk jalannya musyawarah (Musrembangdes).

### **Komunikator**

Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan (penerima pesan) dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam suatu hubungan (Effendy 2011).

### **Pesan**

Pesan disini adalah yang disampaikan kepala desa dan yang diberikan untuk masyarakat menyikapi program-program yang dilakukan pemerintah Desa Soatobaru adapun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Soatobaru.

### **Media**

Dalam membangun Desa Soatobaru melalui media cetak, dalam hal ini Kepala Desa Soatobaru hanya selalu menggunakan media cetak untuk dalam penyampaian informasi, yang berkaitan dengan program perencanaan pembangunan di Desa Soatobaru. Pemerintah desa telah cukup optimal dalam memanfaatkan media namun tingkat keefektifan media yang digunakan memberikan hasil yang berbeda, karena masyarakat Desa Soatobaru lebih cenderung memahami penyampaian informasi tersebut langsung di musyawarahkan. Sebagian besar masyarakat Desa Soatobaru belum bisa memahami tulisan dikarenakan tidak tamat sekolah.

Adapun media yang digunakan oleh kepala desa antara lain adalah :

#### 1. Surat lembaran

Seperti yang kita ketahui, selama ini surat undangan merupakan media cetak yang menjadi prioritas di Desa Soatobaru yang didalamnya merupakan berita yang memiliki nilai informasi yang tinggi. Menyadari semakin pentingnya kebutuhan akan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Bagian pemerintah desa memanfaatkan situasi ini sebagai strategi menggunakan media cetak sebagai media untuk mensosialisasikan program-program perencanaan pembangunan desa sebagai perwujudan dalam membangun partisipasi masyarakat.

Hal ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa surat undangan merupakan media cetak yang cukup dekat dengan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Desa Soatobaru menjadikan media untuk menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat serta mensosialisasikan program-program yang telah dirumuskan oleh pemerintah desa yang seiring dengan membangun partisipasi masyarakat yakni perencanaan pembangunan desa, sehingga informasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa dapat dimengerti oleh seluruh masyarakat Desa Soatobaru.

#### 2. Rapat

Rapat RPJMDes Soatobaru ini merupakan rencana strategis RPJMDes Soatobaru untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan Pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Soatobaru ini diharapkan menjadi Dokumen Perencanaan yang bermakna strategis sehingga dapat menjadi kerangka acuan pembangunan oleh instansi teknis yang terkecil baik ditingkat pemerintah daerah kabupaten, provinsi maupun nasional yang selanjutnya akan terwujud pembangunan yang lebih baik, efektif, efisien dan secara tidak langsung akan mewujudkan masyarakat yang makmur dan berkeadilan.

#### 3. Sosialisasi

Dalam hal ini, untuk mengimplementasikan program-program yang kepala desa susun, kepala desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyampaikan apa yang sudah disusun dalam perencanaan pembangunan baik dalam jangka waktu menengah maupun jangka panjang, Kepala desa melakukan sosialisasi melalui Musrenbangdes dengan tujuan sebagai berikut:

Berdasar hasil lokakarya desa selanjutnya dimusyawarahkan kembali dalam forum musyawarah pembangunan desa dengan tujuan:

1. Memfinalkan Visi dan Misi Desa Soatobaru
2. Pembentukan komisi-komisi sesuai bidang program dan perumusan isu strategis yang menjadi skala prioritas
3. Pembahasan Rancangan RKP Desa dan Membangun Komitmen Pemantauan

Penulis dapat menyimpulkan dari hasil sosialisasi yang Kepala Desa sampaikan kepada masyarakat Desa Soatobaru terkait dengan hasil-hasil Musrenbangdes untuk perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka dari itu, masyarakat sangat setuju dengan program-program yang kepala desa sosialisasikan.

## **Komunikasikan**

Dalam komunikasi tentu saja adanya komunikator yaitu pihak yang memberi pesan/informasi bahkan pihak yang menerima pesan (komunikasikan). Dalam hal ini keberhasilan suatu program pembangunan Desa Soatobaru, dimana pemerintah desa selaku penanggung jawab dalam pembangunan desa harus mengamati isi pesan yang nantinya akan di berikan kepada masyarakat.

Tujuan penerimaan pesan adalah supaya para komunikasikan mampu menerima pesan dan memberikan feedback yang baik kepada komunikator. Media yang dipakai sebagai sarana menyampaikan pesan pun harus disesuaikan. Karena itu, seorang komunikator yang handal harus dapat memahami karakteristik media komunikasi. Sehingga, pada akhirnya dapat memilih media apa yang tepat dan sesuai dengan karakter pesan maupun karakter khalayaknya.

Untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif, kita dituntut untuk tidak hanya memahami prosesnya, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan kita secara kreatif. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi bersifat dua arah yaitu dimana makna yang distimulasikan sama atau serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator atau pengirim pesan.

## **Efek (Feedback)**

Elemen atau unsur terakhir dalam model komunikasi Lasswell adalah elemen (*with what*) effects, yaitu afek atau umpan balik yang di timbulkan dari komunikasi yang dilakukan. Dalam hal ini pemerintah serta aparatur desa melakukan komunikasi kepada masyarakat demi untuk mencapai program pemerintah yang nantinya di implementasikan, harus melihat juga dari aspirasi masyarakat atau tanggapan balik dari masyarakat desa.

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri. Selanjutnya penulis mewawancarai kepada Bapak J.S. selaku masyarakat desa.

## **Pembahasan Hasil Penelitian**

Komunikasi mempunyai sejumlah pengaruh baik terhadap tipe, sasaran, tugas pemerintahan termasuk di dalamnya pemeliharaan hubungan. Tanpa adanya sarana dan fasilitas untuk hubungan komunikasi ke segala arah dalam suatu kegiatan, akan sulit diketahui apa yang sudah dicapai, apa yang akan diraih dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan pekerjaan dan komunikasi adalah sumber informasi bagi pimpinan dalam menginformasikan berbagai kebijakan ataupun tentang pembangunan.

Kaitan teori ini dengan penelitian, penelitian ini berjudul “Peranan Komunikasi Pemerintahan dalam perencanaan Pembangunan di Desa Soatobaru artinya disini adalah bagaimana seorang kepala desa melaksanakan manajemen pemerintahannya yang berkaitan dengan program pembangunan yang ada di desanya. Yaitu pertama sebagai pemimpin desa maka kepala desa memberi peluang kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan artinya dalam penentuan lokasi pembangunan di desa maka kepala desa mengadakan musyawarah desa yang melibatkan pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, aparat sehingga penentuan lokasi pembangunan tepat sasaran hal ini juga berhubungan dengan pengambilan keputusan oleh kepala desa.

Dan komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan dalam hal ini oleh kepala desa tentang program pembangunan haruslah intensif kepada masyarakat dan ada baiknya jika setiap masyarakat diberi tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan, jika kesemuanya dilakukan oleh pimpinan dalam hal ini kepala desa soatobaru maka pelaksanaan pembangunan di desa akan berjalan dengan baik artinya kepala desa mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan yang ada di Desa Soatobaru. Program-program dari pemerintah desa tentunya harus



di bahas dan di kaji secara sistematis, agar apa yang telah di tetapkan bersama dan untuk mengimplementasikan program tersebut itu tepat sasaran demi untuk kesejahteraan masyarakat desa soatobaru.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan program pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Di butuhkan kemampuan untuk mencermati apa saja yang menjadi kebijakan dan arah pembangunan kabupaten sehingga tidak bertentangan dan terjadi sinkronisasi. Program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau di delegasikan pelaksanaannya di desa. Perlu kemampuan koordinasi pemerintah desa dalam melihat rencana program dari pemerintah kabupaten. Perencanaan pembangunan desa di selenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Pemerintah desa harus benar-benar melibatkan masyarakat secara aktif dalam menyusun dan menetapkan rencananya. Dalam menyusun perencanaan program pembangunan Desa Soatobaru, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah pembangunan desa.

Komunikasi pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan lokal berskala desa di laksanakan secara mandiri oleh desa tersebut. Usulan yang disampaikan dalam perencanaan program pembangunan harus benar-benar memperhatikan kewenangan. Masyarakat Desa Soatobaru berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa melaporkan hasil dari berbagai keluhan terhadap komunikasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan APBDDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) kepada masyarakat desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan di Desa Soatobaru.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya hasil penelitian dan pembahasan, dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sesuai dengan fokus penelitian maka penulis menarik kesimpulan mengenai Komunikasi Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara).

1. Pemerintah desa menyampaikan ide dan gagasan dengan tanpa melibatkan keseluruhan warga masyarakat Desa Soatobaru dalam merumuskan program-program pembangunan baik dari musyawarah desa maupun penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).
2. Proses pembangunan yang telah di rencanakan bersama dapat memberikan ide, gagasan serta tenaga yang di aktifkan melalui komunikasi dari beberapa pihak, antara lain: sebagaimana yang di cita-citakan oleh seluruh masyarakat desa soatobaru agar proses pembangunan desa bisa berjalan sesuai dengan harapan. Karena komunikasi sebagai instrumen utama untuk membuat pembangunan desa soatobaru terlaksana dengan baik, agar secara emosional telah terjalin.

### **Saran**

Dari hasil penelitian yang di dapat dari kesimpulan akhir penelitian, mendapatkan beberapa dua poin yang bisa di jadikan saran penelitian ini terkait dengan Komunikasi Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa:

1. Pemerintah desa menyampaikan ide dan gagasan dengan tanpa melibatkan keseluruhan warga masyarakat Desa Soatobaru dalam merumuskan program-program pembangunan baik dari musyawarah desa maupun penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).

2. Pada proses pembangunan desa, diharapkan pemerintah desa segera melakukan perbaikan komunikasi. Dalam hal ini antara kepala desa dan sekretaris desa (koordinasi struktur pemerintah desa) agar segala bentuk hambatan pembangunan yang di sebabkan oleh perbedaan pendapat bisa terselesaikan dengan baik

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas dari pemikiran menuju penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Arsyad, L. 2011. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF.
- Ardiansyah Dani., 2013. *Pengantar Ilmu Komunikasi.*, Graha Indonesia., Bojokerto.
- Effendy, Onong Uchjana, 2013. *Ilmu Komunikasi:Teori dan Praktek.*, PT. Remaja Rosdakarya., Bandung.
- Fisher, Aubrey, 2012. *Teori-teori dan Komunikasi*, Bandung : Remaja Rosdakarya. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Koentjaraningrat. 2012. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Djambata.
- Moleong, L. J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Redoskarya.
- Mulyana, Deddy. 2013. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Rohidi, R dan Mulyarto, T. 2011. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Siagian, S. P. 2012. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya* Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Tarigan, Robinson. 2010. *perencanaan pembangunan wilayah*, edisi revisis. Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2012. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Haji Masagung.
- Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

#### **Sumber Lain :**

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.